

0

PANEL PENASIHAT INDEPENDEN PROYEK TANGGUH

LAPORAN KETIGA
MENGENAI
PROYEK LNG TANGGUH

FEBRUARI 2005

DAFTAR ISI

I.	Ringkasan dan Rekomendasi Pokok	1
II.	Perkembangan Politik/Keamanan	7
III.	Tinjauan	12
IV.	Relokasi Desa Tanah Merah	15
V.	Manfaat Jangka Pendek untuk Daerah Teluk Bintuni dan Hubungan Kerja dengan orang Papua	19
VI.	Hak Keamanan dan Hak Azasi Manusia	23
VII.	Meningkatkan dan Memperlancar Arus Pendapatan Daerah	26
VIII.	Mitigasi terhadap Dampak negative	28
IX.	Transparansi	31
X.	Lingkungan	32
XI.	Informasi Umum	33

Lampiran I: Individu dan Perusahaan yang Dikonsultasi

I. Ringkasan dan Rekomendasi Pokok

Panel Penasihat Independen Tangguh ("TIAP") didirikan oleh BP untuk menyediakan nasihat dari pihak luar kepada para pengambil keputusan papan atas, berkenaan dengan aspek nonkomersial Proyek LNG Tangguh ("Tangguh atau Proyek"). Panel tersebut diketuai oleh Mantan Senator Amerika Serikat George Mitchell dan juga termasuk Lord Hannay of Chiswick dari Kerajaan Inggris, Duta Besar Sabam Siagian dari Jakarta dan Pendeta Herman Saud dari Jayapura. Panel tersebut ditugasi dengan tugas sebagai penasihat BP, dalam bagaimana Tangguh dapat mencapai potensinya sebagai model kelas dunia dalam pembangunan yang memperhatikan: dampak Proyek terhadap masyarakat dan lingkungan setempat; dampaknya terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia secara umum, dan Papua secara khusus, serta evaluasi "risiko terhadap negara Indonesia dan wilayah Papua".

Ini adalah laporan ketiga Panel tersebut. Dua laporan pertama, diserahkan pada bulan Oktober 2002, dan November 2003, dapat diperoleh bersama-sama dengan jawaban BP, dari Panel atau di website BP.⁷

Pada bulan Desember 2004, setelah pemilihan umum dan pelantikan para pejabat pemerintah yang baru, Panel telah membuat kunjungan lagi yang agak lama ke Indonesia, termasuk mengunjungi desa-desa di Teluk Bintuni Tanah Merah Baru ("Tanah Merah"), Tofoi, Taroy dan Onar; kota-kota Babo dan Bintuni; dan kota-kota Manokwari, Jayapura dan Jakarta. Untuk tahun ketiga, Panel telah menemui berbagai tokoh Indonesia, termasuk banyak penduduk desa maupun pemimpin di Desa-desa yang Langsung Terkena Dampak ("DAVs/Directly Affected Villages"), di pantai utara maupun selatan Teluk Bintuni; para pejabat dan pemimpin dari Bintuni, Babo dan Aranday; pejabat pemerintah di Manokwari dan Jayapura; para menteri maupun pejabat pemerintah lainnya di Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat / LSM di Manokwari, Jayapura dan Jakarta; para Bupati dan pejabat di Rektoriat Universitas Papua di Manokwari ("UNIPA") maupun Universitas Cenderawasih di Jayapura; para wakil lembaga-lembaga donor, termasuk United Nations Development Programme

⁷ Website BP adalah www.bp.com. Komunikasi langsung dengan Panel dapat melalui e-mail TIAP@Tangguh.net

3

("UNDP"), Bank Dunia dan Lembaga Amerika Serikat: US Agency of International Development ("USAID"); dan kontraktor-kontraktor BP untuk Proyek tersebut.⁸ Panel telah memanfaatkan bimbingan hukum independen dan sekali lagi memberikan akses sepenuhnya pada semua informasi yang diminta, dan kemerdekaan untuk penelitian maupun atas temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini hanya merupakan kesimpulan dan rekomendasi Panel.

Tanggung diakui oleh para pejabat dan pemimpin di seluruh Teluk Bintuni, Papua dan Jakarta sebagai suatu proyek yang sangat penting bagi daerah tersebut pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Namun, terdapat unsur ketidakpastian, masalah dan ketegangan diantara beberapa unsur masyarakat yang terkena dampaknya. Sebaliknya, terdapat juga suatu konsensus substansial di semua tingkat, bahwa Tangguh akan memberikan manfaat, baik kepada masyarakat setempat, maupun kepada penduduk Papua secara umum. Tangguh diakui secara khusus di daerah Kepala Burung Papua sebagai suatu proyek berpotensi besar, baik secara perekonomian maupun secara sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan sebelumnya, pengakuan ini juga menghasilkan suatu harapan dan risiko, yang tinggi, secara tidak realistis.

Beberapa manfaat dari program BP, telah terbukti di masing-masing DAVs dan di Babo. Proyek DAVs mencakup klinik kesehatan, fasilitas filtrasi air bersih, pemugaran gereja dan mesjid serta dermaga baru di Babo, airstrip baru dan dermaga yang telah menyebabkan peningkatan kegiatan komersial dan di Tanah Merah, maupun di Onar dan Saengga, terdapat pembangunan perumahan dan fasilitas baru. Kegiatan persiapan awal Proyek ini, maupun Tangguh, telah memperkerjakan sejumlah besar orang-orang Papua, menyebabkan peningkatan daya beli dan kegiatan pembelian yang cukup substansial, bagi usaha-usaha Papua.

Daerah ini diuraikan secara lebih lengkap di dalam laporan pertama Panel tersebut. Akan tetapi, penting untuk diingat, bahwa tidak terdapat pusat-pusat populasi yang dekat dengan Tapak/lokasi Tangguh, dan tidak terdapat jalan-jalan yang

⁸Daftar narasumber dan entitas yang dikonsultasi oleh Panel disajikan dalam Lampiran 1.

4

menghubungkan kota-kota dan desa-desa di sekeliling Teluk Bintuni. Teluk ini dianggap oleh para ahli lingkungan sebagai salah satu teluk yang mempunyai ekosistem kelautan yang sangat paling beragam di dunia. Namun, bagaimanapun tidak pernah tersentuh. Terdapat banyak trawler udang yang beroperasi di Teluk ini dan memiliki fasilitas di pantai, maupun dilokasi-lokasi/tapak penebangan pohon, perkebunan minyak kelapa sawit, maupun pembibitan pohon sagu di wilayah sekelilingnya.

Panel tersebut sekali lagi menganggap kegiatan BP, yang ada maupun yang masih dalam rencana untuk Proyek tersebut, yang terkait dengan norma-norma global saat ini banyak ditaati, yang pada gilirannya, akan menghasilkan praktek-praktek terbaik untuk proyek-proyek semacam ini di negara-negara berkembang. Hal ini mencakup Deklarasi Universal mengenai Hak Azasi Manusia dari PBB, Konvensi Organisasi Tenaga Kerja Internasional mengenai Masyarakat Pribumi dan Suku-suku di Negara-negara Merdeka; dan buku panduan Operasional Bank Dunia berkenaan dengan masyarakat setempat/pribumi; azas-azas sukarela dari Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris mengenai hak asasi manusia dan keamanan ("azas-azas sukarela mengenai keamanan" dan kebijakan-kebijakan lainnya dari Bank Dunia dan IFC berkenaan dengan operasi lingkungan maupun perlindungan habitat alam.⁹ BP telah mempunyai komitmen untuk mematuhi standar ini dan Panel menyimpulkan, bahwa sejauh ini ia telah memenuhi komitmennya tersebut.

Tingkat kesesuaian BP dengan ketentuan hukum perundang-undangan Indonesia maupun setempat adalah diluar lingkup permasalahan Panel. Akan tetapi, pertemuan Panel dengan para pejabat setempat di tingkat daerah, maupun nasional, dapat menyimpulkan suatu kesan, bahwa BP tidak mematuhi semua kewajiban hukumnya.

Kebanyakan pejabat dan LSM, dengan siapa Panel bertemu, menyatakan keinginan mereka, bahwa Proyek berkembang kearah kemajuan sedini mungkin.

⁹Ketentuan pokok instrumen ini tercakup dalam Lampiran 2 terhadap Laporan Pertama Panel yang diserahkan pada bulan Oktober 2002 (Laporan Pertama 'TIAP')

5

Panel memahami, bahwa sesuai jadwal saat ini, Tangguh mungkin akan beroperasi sebelum tahun 2008. Kontrak-kontrak komersial dengan Fujian LNG Terminal di Cina, Posco dan K-Power di Korea dan Sempra di Amerika Serikat cukup untuk memajukan kedua "train" LNG sepenuhnya dalam operasi awal. Dengan demikian, BP telah mencatat bahwa pembeli-pembeli tambahan dapat dipastikan, sehingga tambahan train akan ditambahkan di kemudian hari.

Proyek masih akan menghadapi masalah serius, terutama di area-area sehubungan dengan masyarakat setempat, intervensi politik maupun fiskal yang diakibatkan dari usulan pemekaran propinsi Papua; dan perlu konsultasi serta komunikasi dengan para pejabat pemerintah, di tingkat lokal maupun propinsi. Untuk masalah ini dan lainnya, Panel membuat rekomendasi khusus berikut ini yang masing-masing akan diuraikan secara lengkap dibawah ini.

TINJAUAN

- Perasaan perlakuan tidak adil yang dirasakan desa-desa di pantai Utara harus ditangani, bahkan secara lebih serius, daripada sebelumnya. Peningkatan manfaat nyata harus diberikan kepada masyarakat pantai Utara untuk memperbaiki rasa ketidakadilan ini.
- Sebagai akibat dari usulan pembentukan propinsi Irian Jaya Barat, penanguhan dalam penerimaan pendapatan otonomi khusus dan peningkatan yang mendadak dalam pendapatan di masa nanti akan menimbulkan risiko terjadinya ketidakseimbangan yang serius, bahkan akan mengganggu perkembangan perekonomian itu sendiri. Hal ini penting, bahwa BP bekerjasama dengan pejabat pemerintah nasional maupun Propinsi, maupun para pemimpin nasional untuk memikirkan suatu mekanisme guna memajukan dan memperlancar aliran pendapatan ini.
- Konsultasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat, terutama Pemerintah daerah Kabupaten Bintuni harus di intensifkan. BP harus berkonsultasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten yang baru berkenaan dengan pengembangan pembangunan perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan maupun prasarana, dan sejauh itu layak, mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Kabupaten yang baru.
- Komunikasi dengan para stakeholder yang terkena dampak harus ditingkatkan, terutama di wilayah Teluk Bintuni.

RELOKASI DESA TANAH MERAH

- Semua komitmen pada penduduk Tanah Merah harus dilaksanakan sepenuhnya termasuk program pengembangan pertanian, fasilitasi akses ke lahan perikanan yang dekat, pembangunan kapal pelatihan untuk pemrosesan pasca panen produk-produk kelautan, pelaksanaan program pengembangan

7

bisnis skala kecil dan penerapan suatu kerjasama manajemen bagi masyarakat desa. Akan tetapi, BP tidak boleh menanggukhan tahapan yang telah direncanakan dalam pengurangan pengadaan bahan bakar dan persediaan pangan (food basket) demi menghindarkan ketergantungan.

- BP harus mengeksplorasi Kabupaten Bintuni mengenai kemungkinan bantuan beasiswa untuk para siswa DAVs dan desa-desa lainnya di Kabupaten tersebut guna mengikuti sekolah menengah yang baru, di Tanah Merah.

Manfaat Jangka Pendek untuk Daerah Teluk Bintuni dan Hubungan kerja dengan Orang-orang Papua.

- Dana bantuan pengembangan masyarakat untuk masing-masing DAVs harus berlangsung selama tahap konstruksi proyek
- Program BP untuk memberikan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia Papua dalam posisi pelaksana dan posisi manajemen di Tangguh harus dilanjutkan dan dikembangkan.
- Selalu mengupayakan pengadaan barang-barang dan jasa yang memungkinkan diperoleh setempat.
- Berkenaan dengan administrasi dana pengembangan masyarakat DAVs, BP harus menjelaskan bahwa para pemimpin desa harus menyetujui proyek-proyek sebagaimana mestinya yang akan didanai; bahwa semua dana akan tetap tersedia bagi desa tersebut jika tidak dibelanjakan ditahun yang berjalan dan bahwa pembukuan yang sepenuhnya lengkap dari semua dana yang dikucurkan akan dapat dilihat oleh setiap penghuni desa.
- Disamping program kesehatan dalam DAVs dan kegiatan pengendalian malaria, penting bahwa BP bekerjasama dengan pihak kesehatan setempat melaksanakan program pencegahan HIV di seluruh wilayah.
- Disamping dana pengembangan masyarakat tahunan yang diberikan bagi setiap DAV, BP harus bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni untuk mendukung peningkatan sekolah-sekolah dasar di setiap kota DAVs dan kota lainnya yang terkena dampak di wilayah tersebut.
- Dalam bekerja sama dengan kabupaten Bintuni BP harus mengadakan dana atau program untuk mendukung pengembangan masyarakat pantai Utara, termasuk kemungkinan program jangka panjang dalam renovasi dan pembangunan perumahan di setiap DAV.

Keamanan dan hak asasi manusia

- Surat keputusan bersama diantara BP dan Polisi Daerah Papua mengenai pedoman implementasi langkah-langkah keamanan bersama harus dibuat dan diadakan bagi umum, dan sesuai dengan ketentuan pedoman tersebut, BP harus mempunyai komitmen untuk secara terbuka mengungkapkan semua pembayaran atau pengadaan material atau jasa yang dibuat untuk keperluan ini.
- BP harus menjamin bahwa pedoman lapangan untuk langkah-langkah keamanan diantara BP dan Polisi Daerah Papua dapat diterapkan oleh Komando Polisi baru yang dibentuk di Propinsi Irian Jaya Barat.
- Apabila dan ketika suatu subkomando baru didirikan oleh TNI di Kecamatan Bintuni, BP harus mengadakan suatu hubungan yang baik dengan subkomandan dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin, bahwa ia mempunyai komitmen terhadap pedoman lapangan keamanan tersebut dan atas azas keamanan berdasarkan kerjasama dengan masyarakat.

Memajukan dan melancarkan aliran pendapatan ke daerah tersebut

- Penting dalam BP memerankan peran penengah dan pendorong dengan departemen-departemen pemerintah kunci, pemerintah Propinsi dan para pemberi pinjaman multinasional untuk mendorong pembangunan mekanisme pendanaan dan memajukan dan memperlancar aliran pendapatan pemerintah dari Tangguh kepada pemerintah Propinsi dan Kecamatan.

Mitigasi dampak yang merugikan

- Panel memastikan dukungannya untuk rencana-rencana BP bagi para Kontraktor dalam memperkerjakan dan membayar pekerja non-resident atau bukan penghuni di lokasi-lokasi yang terpencil, guna membatasi kegiatan diluar tapak dari para pekerja ini dan sejauh memungkinkan untuk memperkecil hingga sekecil-kecilnya penggunaan uang tunai di atau disekitar tapak/lokasi proyek tersebut.

9

- Kewajiban kontraktual untuk hubungan kerja dan pelatihan yang harus diimplementasikan oleh para Kontraktor BP dan subkontraktornya harus secara seksama dipantau dan secara ketat ditegakkan.
- Suatu mekanisme harus ditetapkan untuk pemantauan dan pelaporan adanya pelanggaran kebijakan-kebijakan BP oleh karyawan-karyawan BP manapun atau Kontraktornya berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, tenaga kerja lingkungan atau hubungan masyarakat.
- Bekerja dengan Kabupaten Bintuni dan Departemen Perikanan, BP harus mendukung pengembangan rencana pengelolaan perikanan untuk Teluk Bintuni maupun manfaat nyata khusus untuk para nelayan setempat dalam bentuk kapal penangkap ikan dan perlengkapannya, yang maju.

Transparansi

- Bekerja dengan para pihak yang berwenang baik Nasional, Propinsi maupun setempat, BP harus mendorong publikasi yang jelas mengenai semua penerimaan dan pengucuran berkenaan dengan pendapatan Tangguh. Segera BP harus mendorong BPMigas untuk melebarkan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian bagi hasil produksi dan unsur-unsur non-komersial atau ringkasan rencana pengembangan; mempublikasikan pedoman lapangan untuk keamanan dengan Polisi Daerah dan mengungkapkan pembayaran-pembayaran apapun yang telah dibuat dan dengan demikian sesuai dengan perjanjian; dan mempublikasikan untuk setiap DAV suatu pembukuan yang lengkap dari pembelanjaan dana pengembangan masyarakat tersebut.

Lingkungan

- Disamping komitmennya yang ditetapkan didalam AMDAL, BP harus berkonsultasi dengan pejabat lingkungan yang berwenang baik lingkup setempat, propinsi maupun nasional untuk mengamankan ekosistem Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tapak/lokasi proyek tersebut.
- BP harus memantau semua limbah dan buangan lainnya, di darat maupun lepas pantai selama pembangunan/konstruksi dan mengirimkan hasilnya kepada pejabat berwenang yang terkait.

10

- BP harus menjamin dan melanjutkan komitmennya untuk mendukung pelestarian hutan mangrova/bakau-bakau yang rusak/kritis termasuk mendirikan Cagar Alam di Teluk Bintuni.

Informasi umum

- Sangatlah perlu untuk menggunakan suatu metode yang baru dan inovatif dalam mengkomunikasikan suatu informasi yang dapat dipahami dan khusus, berkenaan dengan kegiatan proyek dan komitmen terhadap masyarakat Bintuni.
- BP harus mencari suatu publikasi yang lebih luas dalam media luar dengan artikel-artikel berkenaan dengan proyek-proyek yang ada dan masih dalam perencanaan, di wilayah tersebut, dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan perekonomian di wilayah Teluk Bintuni.
- BP harus menetapkan prosedur untuk media dan komunikasi berkenaan dengan kecelakaan atau insiden merugikan, yang terkait dengan Proyek tersebut.
- Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintuni, BP harus membentuk Forum Teluk Bintuni, sebagai wadah mekanisme untuk mempublikasikan kegiatan dan masalah-masalah yang terkait dengan Tangguh, dan meningkatkan komunikasi antar masyarakat di seluruh wilayah Teluk Bintuni.

II. Pengembangan keamanan politik

Tahun 2004, adalah tahun yang sangat positif untuk stabilitas politik Indonesia. Meskipun tahun tersebut berakhir dengan suatu bencana alam gempa bumi dan tsunami yang secara langsung memberikan dampak kepada Aceh dan Sumatera Utara, namun tahun 2004, akan juga diingat sebagai suatu titik balik bagi demokrasi di Indonesia, yang telah dilaksanakan secara berhasil dalam salah satu pemilihan umum langsung yang terbesar dalam sejarah dan kemudian melalui masa transisi secara aman, untuk suatu oposisi yang dipilih dengan legitimasi. Baik pemilihan legislatif/parlemen pada awalnya dan pemilihan Presiden secara langsung pada bulan Juli dan September, hampir terbebas dari kekerasan, dengan beberapa kekecualian yang tidak terlalu serius diwarnai dengan pemalsuan. Lebih dari 110 juta orang telah memberikan suaranya, kira-kira 89 persen dari elektorat. Susilo Bambang Yudhoyono ("SBY"), mantan Menko Pertahanan dan Keamanan dalam Pemerintahan Presiden Megawati telah memenangkan lebih dari 60 persen suara, dengan membawa 30 dari 33 Propinsi dengan margin kemenangan yang substansial.

Wakil-wakil Papua yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan (DPD) sebagai dua Propinsi yang terpisah – Papua dan Irian Jaya Barat. Papua (tidak termasuk Irian Jaya Barat) telah memberikan kepada SBY 60 persen pluralitas sementara Irian Jaya Barat memberikan 53 persen. Namun, kenyataannya hasil di Papua sangat rendah daripada kebanyakan bagian lain di Negara ini, sebagian disebabkan oleh karena keadaan transportasi dan komunikasi di banyak wilayahnya, yang sulit. Transisi kekuasaan meskipun tidak kooperatif, terlaksana dengan damai dan tenang.

SBY mulai menjabat dengan suatu legasi itikad baik yang sangat berarti dan suatu amanah yang jelas untuk reformasi. Dengan memperhatikan jaminan SBY kepada Panel, di tahun 2003, bahwa otonomi khusus akan sepenuhnya dilaksanakan, maupun tindakannya sejak menjabat Presiden, pemilihannya juga dapat dianggap merupakan suatu perkembangan yang positif dan suatu kekuatan untuk stabilitas di Papua. Selama masa jabatannya yang pendek, terdapat banyak perdebatan mengenai cepatnya pengambilan keputusan SBY, komposisi kabinetnya dan penentuannya terhadap reformasi hukum maupun ekonomi yang signifikan. Akan tetapi, tidak ada yang memperselisihkan arah yang jelas dari upayanya menuju reformasi. Dalam masa 50 hari jabatannya, sebelum adanya bencana tsunami yang hebat, penyelidikan telah dimulai dari lebih 22 pejabat politik senior terhadap indikasi korupsi, termasuk lima Gubernur. SBY dengan jelas yakin, bahwa investasi asing langsung adalah penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia dan bahwa suatu sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan dan tidak korup adalah penting untuk menarik investasi asing langsung ini.

Kebingungan mengenai pemekaran Papua, menjadi lebih jelas. Pada bulan Oktober 2004, Pengadilan Konstitusi yang mengatur Inpres Presiden 2002-1, yang memekarkan Papua menjadi tiga Propinsi, dianggap tidak konstitusional karena telah melanggar mekanisme pengambilan keputusan khusus yang tercakup dalam ketentuan hukum perundang-undangan Otonomi Khusus dalam menentukan, baik apakah Papua dapat dimekarkan menjadi banyak Propinsi ataupun tidak. Bagaimanapun, Peradilan mengajukan bahwa pengaturannya hanya bersifat prospektif dan bahwa Propinsi Irian Jaya Barat, yang telah membentuk Pemerintahan embrionik dan wakil-wakil terpilihnya di Dewan Perwakilan Nasional, akan tetap eksis. Pengaturan oleh Pengadilan Tinggi Indonesia ini menetapkan status hukum Propinsi baru saat ini. Sementara beberapa orang di Papua terus mempermasalahkan hasil ini, dan banyak yang terus meragukannya, namun nampaknya, untuk saat ini, Propinsi Irian Jaya Barat akan terus eksis⁴. Tangguh terletak didalam Propinsi baru ini dengan ibukotanya, Manokwari.

Akan tetapi, penerapan otonomi di Irian Jaya Barat ini tidak jelas. SBY melakukan perjalanan ke Papua, pada tanggal 25 Desember, untuk mengumumkan penerbitan Petunjuk Presiden, yang mengatur pembentukan Majelis Permusyawarahan Rakyat Papua (MRP), Dewan Penasehat Daerah yang diatur dalam ketentuan hukum Otonomi Khusus. MRP akan terdiri dari sepertiga para pemimpin adat (tradisional), sepertiga para tokoh agama dan sepertiga wakil-wakil wanita. Pemilihan untuk MRP akan berlangsung pada akhir tahun 2005. Dewan akan memberikan "masukan" mengenai para calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diusulkan oleh legislatif dan mengenai "peraturan daerah" yang diusulkan oleh legislatif atau Gubernur dan atau perjanjian-perjanjian diusulkan untuk diadakan di antara Gubernur dan pihak-pihak ketiga. Dewan juga bertanggung jawab untuk "mempertimbangkan dan menyetujui" usulan pemekaran Propinsi tersebut lebih lanjut. Terdapat suatu keperdulian mengenai kewenangan, maupun wilayah yurisdiksi MRP, namun pembentukannya akan mengimplementasikan suatu ketentuan pokok Otonomi Khusus tersebut.

Meskipun SBY tidak mengatakan apapun mengenai Irian Jaya Barat pada kunjungannya bulan Natal ke Papua, laporan menunjukkan bahwa Menteri Dalam Negeri pada tanggal 4 Januari 2005, telah mengatur bahwa suatu MRP yang serupa akan didirikan untuk Irian Jaya Barat⁵. Situasi ini bagaimanapun sama sekali tidak jelas. Namun, berdasarkan atas laporan ini dan rapat-rapat Panel dengan pejabat Pemerintah Indonesia, nampaknya terdapat suatu maksud yang jelas di tingkat Presidensial untuk menerapkan Otonomi Khusus sepenuhnya, namun secara terpisah untuk Irian Jaya Barat. Legislasi baru dapat disyaratkan untuk menyelesaikan sasaran ini, terutama berkenaan dengan bagi hasil pendapatan Propinsi. Kebutuhan apapun akan keterlibatan parlemen, sudah barang tentu, menambah ketidakpastian pada hasil lebih lanjut.

Pada saat kunjungan Panel pada pertengahan Desember, sementara terdapat banyak keraguan mengenai pembagian Propinsi dan aplikasi atau penerapan dari daerah Otonomi Khusus, banyak orang Papua dengan siapa Panel bertemu

Pada saat Panel berkunjung pada pertengahan Desember, sementara banyak kebingungan atas pemekaran propinsi tersebut dan penerapan Otonomi Khusus, banyak orang Papua dengan siapa Panel bertemu, menyetujui pembentukan Propinsi baru tersebut. Keberatan yang terkuat adalah terletak pada cara Propinsi ini dibentuk. Para pemimpin di Wonokwari dan Bintuni menyetujui pembentukan Propinsi baru ini dan berargumentasi bahwa Propinsi yang lebih kecil akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun pemekaran tetap bersifat sangat kontroversial.

Sejalan dengan berkembangnya pengembangan politik, terdapat suatu pengembangan positif berkenaan dengan peran TNI dalam perlindungan aset-aset nasional yang vital dan peran serta, didalam usaha-usaha pada umumnya. Pertama, suatu keputusan telah diterbitkan Pemerintahan Megawati yang akan memberikan suatu pengaturan keamanan pada prioritas yang penting untuk masing-masing Perusahaan. Dibawah pengaturan ini, para prajurit TNI akan kembali ke pabrik/instalasi badan usaha hanya atas permintaan Polisi Nasional yang pada dasarnya, menggunakan personil di instalasi-instalasi ini apabila terdapat suatu gangguan keamanan.

Kedua, sebelum akhir Pemerintahan Megawati, Parlemen telah meluluskan suatu undang-undang reformasi militer. Ketentuan intinya menjelaskan bahwa militer akan tunduk pada kekuasaan Menteri Pertahanan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini juga mencakup perlindungan dari aset-aset nasional yang vital dari fungsi inti TNI dan mensyaratkan dalam jangka waktu lima tahun TNI akan mendivestasi diri dari semua kegiatan bisnis yang dimiliki atau dioperasikan oleh militer. Meskipun hal ini tidak mungkin, bahwa suatu divestasi bisnis akan berlangsung dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, namun Menteri Pertahanan Juwono

4 Laporan terakhir mengindikasikan, bahwa Gubernur Papua telah mengajukan kepada Presiden pemekaran propinsi menjadi 5 wilayah terpisah pada 2009. Lihat, Kyodo News. 8 Februari, 2005.
5 Lihat Reformasi, 7 Januari, 2005 pada halaman 12.

Bagaimanapun, di Papua terdapat suatu kegiatan TNI yang berlanjut terdapat adanya kegiatan separatis yang dicurigai di daerah Tanah Tinggi Pusat, dan wilayah-wilayah dekat perbatasan dengan Papua Nugini, yang telah menyebabkan suatu kecemburuan dengan adanya kekerasan yang berlebihan terhadap penduduk sipil. Sebagai tanggapan dari keluhan ini, SBY secara khusus menginstuksikan TNI bahwa "operasinya harus dilaksanakan secara bijaksana dan seksama dan bahwa masyarakat tidak boleh lagi menderita dari segala tindakan yang berlebihan."⁶ . Sementara insiden-insiden ini telah sangat serius menyebabkan kepedulian ini, tidak terdapat operasi TNI semacam ini di wilayah Kep. Burung.

6 Lihat. *Yudhoyono meminta mantan Gubernur Papua untuk membantu memecahkan konflik masyarakat Papua*, Tempo Interaktif (5 Nov, 2004)

Penyidikan atas pembunuhan tiga guru (dua diantaranya orang Amerika) yang berkerja untuk Freeport MacMoRan dekat Timika, pada tanggal 31 Agustus 2002 tetap merupakan titik ketegangan diantara Indonesia dan Amerika Serikat. Kongres sekali lagi telah menekankan suatu kondisi restorasi dari Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional ("IMET") yang melarang pendanaan sampai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menentukan, bahwa TNI telah berkerjasama dengan U.S. Federal Bureau of Investigation ("FBI") yang menyidik pembunuhan-pembunuhan Timika tersebut.⁷ Lebih lagi, kembalinya kesimpulan sebelumnya US State Department bahwa: "para anggota prajurit tentara Indonesia bertanggungjawab atas pembunuhan di Papua, Departemen Kehakiman AS kini telah menuduh sehubungan dengan pembunuhan ini, seorang Indonesia, yang dicurigari sebagai komandan operasional Pergerakan Papua Merdeka ("OPM"). Pada waktu ini, kendati penyidikan tersebut belumlah disimpulkan, namun FBI tidak menemukan keterlibatan TNI dalam serangan ini.

III. Tinjauan Ulang

Panel menemukan bahwa kebanyakan pihak yang terkait di semua sektor masyarakat mendukung Proyek Tangguh ini dan mendukung pembangunannya segera. Konsensus ini merebak di seluruh Wilayah Bintuni, meskipun ada masalah serius dalam beberapa aspek khusus tentang Proyek ini, di wilayah ini. Dukungan untuk Proyek ini ke depan tanpa penangguhan, juga ada di antara pejabat Pemerintah dan LSM, di Manokwari, Jayapura, maupun pejabat papan atas di Pemerintahan Indonesia, di Jakarta.

Namun, kekhawatiran tetap ada dan keluhan tetap berlanjut. Beberapa terkait dengan harapan yang tidak realistis; bagaimanapun, beberapa lainnya dapat dibahas dengan wawasan dan komunikasi yang memadai, yang pada titik ini, masalah paling serius yang harus di tangani BP adalah:

1. Perasaan tidak diperlakukan adil dari penduduk pantai utara. Penduduk di Pantai Utara cemburu dengan pembanguann Tanah Merah, Saengga dan Onar, yang bagi mereka menunjukkan manfaat BP yang tidak diterima merata. Kecemburuan dan kebingungan ini, di antara penduduk pantai utara berkenaan alasan ketidakseimbangan ini, yang bukannya tak dapat

dibenarkan. Panel sebelumnya merekomendasikan agar "tingkatkan manfaat nyata yang diberikan kepada penduduk pantai utara untuk memperbaiki persepsi ketidakseimbangan ini."⁹ Hal ini belum diselesaikan. Panel hamper tidak melihat bukti mengenai langkah-langkah tambahan yang diambil BP, untuk mengurangi ketegangan ini.

2. Implikasi Fiskal adanya Pemekaran Papua bagi Irian Jaya Barat yang diusulkan .

Untuk tiga tahun terakhir, Papua (termasuk Irian Jaya Barat) telah memperoleh manfaat secara signifikan dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari adanya penerapan Otonomi Khusus. Bagaimanapun, pendapatan ini diperoleh secara substansial dari Operasi Tambang Freeport dekat Timika. Merupakan pemahaman Panel, bahwa pada beberapa hal di saat nanti, pendapatan Freeport hanya akan mengalir ke Propinsi Papua yang ada dan bukan ke Propinsi Irian Jaya Barat yang diusulkan. Jelas, bahwa pendapatan yang signifikan dari Otonomi Khusus terkait dengan Tangguh tidak akan mengalir untuk sekurang-kurangnya 10 tahun, sebagai akibat Irian Jaya Barat bisa ditinggalkan tanpa banyak manfaat ekonomi Otonomi Khusus atau kadangkadang terkecuali adanya mekanisme yang bisa diterapkan untuk memajukan aliran pendapatan dari Tangguh. Kepedulian Panel dalam hal ini dinyatakan dalam laporan sebelumnya yang diintensifkan sebagai hasil dari pembentukan propinsi yang diusulkan tersebut.

3 Konsultasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat

Sampai saat ini, sulit bagi BP untuk memfokuskan pada koordinasi dengan pemerintah khususnya pihak yang berwenang. Akan tetapi dengan pengadaan modal Kecamatan di Bintuni sekarang, jelas wilayah yurisdiksi, dimana Tangguh terletak dan dengan siapa BP harus bekerja sama. Panel terkesan dengan wawasan dan pemahaman dari Wakil Bupati serta pihak pemerintah daerah di Bintuni. Panel telah sebelumnya menyarankan bahwa BP mengembangkan suatu "hubungan kerjasama yang sehat dengan para pejabat Kabupaten dan pemerintah daerah lainnya di Bintuni."¹⁰ Panel saat ini

¹⁰ TIAP Second Report at p. 18.

merekomendasikan bahwa BP dan dimana tepat, berkoordinasi dengan kegiatan pengembangan komunitas, termasuk pendidikan, kesehatan, perikanan dan prasarana dengan Kabupaten Bintuni.

4. Komunikasi yang tidak memadai terutama di wilayah Teluk Bintuni. Sementara hal ini merupakan suatu penugasan yang sulit mengingat bahwa keadaan komunikasi di wilayah ini sangat primitif, maka Panel merasa yakin bahwa penting untuk mengupayakan pelaksanaan peningkatan komunikasi. Komunikasi setempat dengan menggunakan media apapun jika ada yang menjelaskan komitmen BP dan program-programnya adalah penting. Keraguan mungkin tidak akan secara keseluruhan hilang, namun komunikasi yang lebih baik akan sangat membantu untuk meningkatkan saling pemahaman dan mengurangi ketegangan.

Meskipun masalah-masalah ini serius banyak telah dapat dilalui pada tahun yang lalu. Pertama, secara signifikan relokasi Tanah Merah telah diselesaikan tanpa insiden. Terdapat juga keraguan bahwa kondisi penghidupan dari semua penduduk Tanah Merah telah ditingkatkan secara dramatis. Kedua, telah dicapai perjanjian dengan polisi Papua mengenai pedoman lapangan untuk langkah-langkah pengamanan bersama yang mengimplementasikan struktur dan perlindungan komunitas/masyarakat didasarkan atas keamanan dan penerapan secara langsung azas-azas sukarela dalam hal keamanan berbasis masyarakat. Disamping itu, Komando Regional TNI telah menyatakan persetujuannya dan pemahaman azas-azas keamanan berbasis masyarakat. Meskipun peranan polisi dan TNI dalam masalah keamanan di Tangguh "tetap merupakan salah satu dari masalah yang paling peka untuk Proyek tersebut."¹¹ terdapat setiap alasan untuk meyakini bahwa keamanan berbasis masyarakat dapat di implementasikan secara berhasil.

Rekomendasi:

- Rasa perlakuan yang tidak adil dari penduduk desa pantai utara harus di atasi bahkan dengan lebih serius daripada sebelumnya. Peningkatan

¹¹ TIAP Second Report at p.12

manfaat yang nyata harus diberikan kepada masyarakat pantai utara untuk memperbaiki persepsi yang tidak seimbang dan tidak adil tersebut.

- Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat yang diusulkan tersebut, maka penangguhan dalam penerimaan pendapatan Otonomi Khusus serta peningkatan yang tiba-tiba dalam pendapatan dimasa nanti akan memberikan risiko menciptakan suatu ketidak keseimbangan yang serius dan hambatan pengembangan ekonomi. Hal ini penting, bahwa BP bekerjasama dengan pejabat pemerintah nasional maupun propinsi maupun para pemberi pinjaman multinasional untuk memikirkan suatu mekanisme guna memajukan dan memperlancar aliran pendapatan tersebut.
- Konsultasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat terutama dengan pejabat Kabupaten baru di Bintuni harus diintensifkan. BP harus berkonsultasi dengan pejabat Kabupaten yang baru berkenaan dengan pengembangan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan dan prasarana serta sejauh memungkinkan mengkoordinasikannya dengan Kabupaten yang baru tersebut.
- Komunikasi dengan para stakeholders yang memperoleh dampak harus ditingkatkan terutama di wilayah Teluk Bintuni

IV. Relokasi Tanah Merah

Relokasi Tanah Merah ketika ditinjau dalam isolasi harus dipertimbangkan sebagai suatu lompatan keberhasilan. Rumah-rumah dan fasilitas baru di Tanah Merah maupun rumah-rumah baru di Onar dan renovasi di Saengga merupakan peningkatan utama dari sudut pandang penduduk, amenities umum, sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas agama. Setiap keluarga di Tanah Merah memilih desa tersebut dan tapak/lokasinya dari hunian yang baru ini yang menarik dan dibangun dengan baik. Masing-masing hunian ini mencakup listrik, air yang mengalir fasilitas masak-memasak dan toilet. Panel dapat nyatakan bahwa kondisi penghidupan untuk setiap penduduk di Tanah Merah telah meningkat secara material.¹² Suatu perbandingan yang paling

¹² Kesimpulan ini dipastikan dalam rincian yang luas dalam Laporan Panel Penasihat Independen mengenai Pemukiman Kembali, yang menyimpulkan bahwa "risiko kemiskinan yang utama, yang menyiratkan kehilangan atas lahan sebelumnya dan perumahan yang digantikan, telah secara efektif diprakirakan atau dimitigasi

mencolok di Onar adalah dimana rumah-rumah baru itu bersebelahan, namun terpisah dari desa yang ada sebelumnya.

Akan tetapi, ketika ditinjau dalam suatu konteks yang lebih luas, pembangunan Tanah Merah telah memperburuk beberapa kecemasan yang signifikan. Pertama dan paling penting Tanah Merah merupakan suatu gambaran yang nyata dari ketidakadilan kepada para penduduk dipantai utara DAV. Hal ini telah menuangkan minyak pada keluhan oleh para penduduk pantai utara bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil. Dan beberapa para pejabat yang telah terpilih dan LSM di Jayapura telah menyatakan kepedulian dan kekhawatirannya bahwa rumah-rumah yang dibangun untuk para penduduk Tanah Merah telah berlebihan dan tidak pada tempatnya dan bahkan menciptakan suatu kecemburuan dan benturan. Mengingat perbandingan diantara perumahan dan fasilitas yang ada di wilayah DAV mudah untuk memahami perasaan ini. BP harus menangani reaksi ini secara langsung dan kuat.

Ketegangan semacam ini berakar dari keyakinan penduduk pantai utara berdasarkan hak Adat bahwa gas dimiliki oleh penduduk pantai utara tersebut. Sementara klaim ini tidak mempunyai keabsahan hukum samasekali, dibawah ketentuan hukum perundang-undangan di Indonesia, hal ini harus dipertimbangkan oleh BP. Hal ini akan merupakan suatu hal yang disayangkan apabila keberhasilan relokasi Tanah Merah telah dihambat oleh rasa dengki dari pihak lainnya yang timbul oleh tindakan ini.

Kedua, terdapat suatu bahaya sesungguhnya bahwa penduduk yang dimukimkan kembali di Tanah Merah akan menjadi tergantung pada manfaat yang diberikan oleh BP. Keduanya pasokan bahan bakar yang sifatnya sementara untuk pembangkit tenaga listrik dan keranjang makanan atau persediaan makanan yang diberikan selama jangka waktu transisi dan direncanakan akan ditiadakan. Para penduduk khawatir mengenai pengakhiran atau pemberhentian dari manfaat-manfaat ini, yang telah banyak yang dilakukan oleh tim pemukiman kembali BP untuk

dalam kasus Tanah Merah" dan bahwa "kedua pemukiman ini (Tanah Merah dan Onar) mungkin dapat bersaing secara berhasil saat ini untuk memperebutkan gelar desa yang penampilannya terbaik yang dapat diberikan kepada desa-desa di Indonesia." Laporan Lapangan Kedua mengenai Pemindahan dan Pemukiman Kembali Populasi di Proyek BP Tangguh ("Laporan Pemukiman Kembali "), Prof. Michael Cernea, November 10, 2004

memudahkan transisi ke Tanah Merah tersebut. Relokasi Tanah Merah dari penduduk memenuhi atau telah melebihi standar Bank Dunia.¹³ Akan tetapi BP harus taat dengan pemberhentian pengadaan yang telah dijadwalkan tersebut guna menghindari suatu ketergantungan yang berlebihan. BP harus melanjutkan semua programnya untuk pengembangan pertanian, memudahkan akses ke lahan perikanan yang dekat disitu, membangun kapal, melatih pemrosesan pasca panen dari produk-produk kelautan, mengimplementasikan program pengembangan bisnis skala kecil, dan mendirikan suatu koperasi yang dikelola bersama penduduk untuk memperoleh suatu tanggung jawab operasional bagi fasilitas dan utilitas desa tersebut. Program ini akan membantu semua desa-desa baru yang jadi mandiri dan operasional. Penduduk desa akan didorong untuk melanjutkan dengan penangkapan udang dan ikan serta kegiatan lainnya yang perlu untuk meningkatkan pendapatan. BP harus memenuhi semua komitmennya namun bantuannya setelah masa transisi ini harus dikurangi secara bertahap sampai ketinggian dukungan yang akan disediakan untuk DAV lainnya.

Ketiga, salah satu dari yang paling terkesan dari fasilitas-fasilitas baru di Tanah Merah adalah sekolah menengah yang baru dan asrama bagi pengajarnya. Akan tetapi pada saat kunjungan Panel sekolah dan asrama ini nampak kosong dan tidak digunakan disebabkan kurangnya para guru dan siswa. Hal ini menggambarkan suatu kekurangan telitian perencanaan sebelumnya dan suatu contoh dari kegagalan BP dalam mengkoordinasikan konstruksi dan operasi sekolah dengan para pejabat di Kabupaten Bintuni.¹⁴

Panel yakin bahwa hal ini dapat diperbaiki, namun hanya dalam koordinasi erat dengan para pejabat setempat. Panel telah diinformasikan oleh pejabat Bintuni, bahwa pendidikan merupakan suatu prioritas penting dan bahwa Kabupaten telah merekrut sejumlah substansial guru-guru baru pada dua tahun terakhir ini. Mengingat fasilitas asrama yang sangat baik di Tanah Merah dan kurangnya sekolah-sekolah menengah di wilayah Teluk Bintuni, maka harus memungkinkan untuk membuat fasilitas baru ini menjadi "magnet" bagi suatu sekolah menengah umum yang akan menarik para siswa

¹³ Lihat Standar world Bank untuk Pemukiman Kembali suka rela di www.worldbank.org.

¹⁴ Kabupaten Bintuni dapat tidak ada pada saat Tanah Merah telah dirancang sejak awal. Namun, kabupaten ini operasional baru ketika desa tersebut tengah dibangun.

yang layak dari semua wilayah DAV atau wilayah yang lebih luas. Panel menyarankan bahwa BP berkonsultasi dengan kabupaten berkenaan dengan kemungkinan beasiswa yang didanai oleh BP untuk para siswa dalam semua wilayah DAV lainnya dan untuk menggunakan sepenuhnya fasilitas tersebut bagi desa-desa lainnya di kabupaten tersebut guna mendukung para siswa yang tinggal di Tanah Merah. Karakteristik dari program dukungan ini baik untuk siswa maupun guru harus dapat dirangkum oleh kabupaten. Apabila hal ini dapat di selesaikan, maka akan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menyebarkan manfaat pendidikan tersebut dari Tangguh ke semua desa diwilayah tersebut.

Keempat, perumahan dan fasilitas baru disetiap desa mungkin akan menarik migran baik dari orang-orang Papua sendiri maupun non Papua. Hal ini akan dimulai diwilayah Onar. Disamping itu penduduk Tanah Merah yang telah menerima perumahan baru dapat dicoba untuk menyewa atau menjual rumah-rumah mereka untuk tunai atau pertimbangan lainnya. Evolusi migrasi dan kepemilikan dimasing-masing desa ini harus pada kesempatan pertama diserahkan kepada para penghuni dan pimpinan mereka. BP tidak boleh menonjolkan diri dalam pengambilan keputusan ini akan tetapi ia harus secara seksama memantau pengembangan-pengembangan sedemikian rupa untuk menyadari apabila timbul ketegangan.¹⁵

Rekomendasi:

- Semua komitmen untuk penduduk desa Tanah Merah harus diimplementasikan secara penuh termasuk program untuk pengembangan pertanian, fasilitasi akses ke lahan perikanan yang dekat, pembangunan kapal, pelatihan untuk pemrosesan pasca panen produk-produk kelautan, mengimplementasikan program pengembangan bisnis skala kecil dan mendirikan koperasi dengan manajemen penduduk desa. Akan tetapi BP, tidak boleh menangguhkan penghentian terjadwal dari pengadaan bahan bakar dan bantuan pangan untuk menghindarkan ketergantungan.

¹⁵ Pemukiman Kembali yang direkomendasikan Panel dalam informasi kampanye untuk tidak mendorong imigrasi untuk tujuan memperoleh pekerjaan dari Proyek. Lihat Laporan Pemukiman Kembali pada halaman14.

- BP harus mengeksplorasi dengan pejabat Kabupaten Bintuni mengenai kemungkinan pemberian beasiswa bagi para siswa dari DAV dan desa-desa lainnya di Kabupaten tersebut untuk mengikuti pelajaran di sekolah umum yang baru di Tanah Merah.
- V. Manfaat Jangka Pendek untuk Wilayah Teluk Bintuni dan Hubungan Kerja dengan Penduduk Papua

Selain dari relokasi Tanah Merah, tindakan yang dilaksanakan BP telah mulai memberikan manfaat yang nyata. Dana pembangunan masyarakat dari BP untuk setiap DAV dan Strategi Sosial Terpadunya telah memberikan manfaat nyata, di setiap DAV, dan mulai memberikan manfaat pembangunan persekonomian dan sosial nyata untuk wilayah Teluk Bintuni.

Masing-masing DAVs menerima dana bantuan pembangunan masyarakat sebesar US\$30.000 per tahun untuk ditanamkan pada proyek-proyek pilihannya. Sejauh ini, proyek-proyek ini meliputi: reservoir air minum, klinik kesehatan, perkakas dan buku-buku sekolah; dermaga baru; dan renovasi fasilitas ibadah. Masing-masing proyek ini akan langsung memberikan manfaat kepada masyarakat dan harus dilanjutkan selama tahap pembangunan.

Di samping itu, pemberian kesempatan kerja, pengadaan dan pembangunan akan pada umumnya mulai memberikan dampak positif di wilayah tersebut. Lebih dari 500 orang penduduk Papua telah dipekerjakan oleh BP dan para subkontraktornya untuk tujuan beragam seperti Tim Lapangan Masalah Masyarakat (CAFT); Pasukan Satuan Pengaman Pelindung; dalam mendukung kamp Babo dan tapak Proyek. BP mempunyai komitmen untuk menawarkan pekerjaan selama tahap pembangunan untuk sekurang-kurangnya satu anggota per keluarga, per

DAV dan hal ini merupakan komitmen yang akan dilaksanakan melalui kontraktor BP;

Panel menyatakan kembali rekomendasi sebelumnya, bahwa BP telah memantau dan menegakkan kewajiban kontraktual untuk pemberian hubungan kerja dan pelatihannya, yang juga akan berlaku bagi kontraktor dan subkontraktornya. BP harus menjamin, bahwa komitmen ini dipenuhi dan bahwa semua karyawan Papua diperlakukan secara adil. Di samping itu, BP harus mendorong kontraktornya untuk mendaftarkan karyawannya secara setempat, daripada secara tempat tinggal tetapnya. Pendaftaran semacam ini akan memberikan kepada pemerintah setempat persentase yang berlaku dari pendapatan pajak nasional yang dialokasikan kepada tempat hubungan kerja.

BP terus melatih 28 lulusan kolese Papua, dalam operasi yang lebih canggih dan aspek manajemen operasi LNG. Mereka ini dan orang-orang Papua lainnya yang memenuhi syarat yang menyelesaikan program multi tahunan ini akan kembali ke Tangguh untuk memperoleh posisi penanggungjawab. Program ini harus berlanjut, dengan menambahkan siswa setiap tahunnya.

Di samping itu, BP telah mengadakan pembelian barang-barang senilai US\$ 38 juta dari kontraktor lokal. Panel telah diberitahu bahwa BP mencari semua bahan yang memungkinkan dari pemasok setempat. Setiap upaya harus diupayakan untuk terus mengadakan barang-barang dan jasa setempat di mana memungkinkan, termasuk mendorong dan membantu pengembangan koperasi setempat. Di samping itu, dengan pembangunan air strip baru di Babo, dan fasilitas dermaga yang diperluas, baik

pengangkutan air dan udara telah meningkat di Babo, dengan perluasan provider lokal dari kegiatan komersial. Perkembangan ini disambut baik di Babo, Bintuni dan oleh pejabat-pejabat propinsi, yang menekankan perlunya pemberian hubungan kerja sebagai unsur-kunci dari sumbangsih BP kepada masyarakat.

Beberapa masalah khusus timbul sehubungan dengan administrasi daana pengembangan masyarakat DAV. Pertama, mungkin terdapat perselisihan dalam suatu desa, mengenai penggunaan sebagaimna mestinya dana ini. BP harus menjalankan kehati-hatian untuk menjamin bahwa terdapat konsensus di antara para pemimpin desa mengenai proyek-proyek yang tepat yang akan dikembangkan. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang serius, bukanlah untuk BP untuk memilih di antara proyek-proyek yang bersaing. Kedua, BP harus menjelaskan kepada masing-masing DAV, bahwa dana ini tersedia dan akan tetap tersedia bahkan apabila tidak sepenuhnya dikucurkan, dalam tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, masing-masing DAV harus memahami dengan jelas, bahwa ia tidak akan kehilangan dananya, sekiranya tidak dibelanjakannya segera (misalnya, jika konsensus tidak tercapai untuk proyek khusus). Ketiga, adalah penting bahwa pengawasan yang ketat dan pembukuan yang transparan diterapkan bagi pembelanjaan ini. Baik BP dan penghuni masing-masing DAV, akan berhak atas pembukuan lengkap sehingga tidak akan ada pertanyaan, bahwa dana ini sepenuhnya dikucurkan dan dibelanjakan sebagaimana mestinya.

Panel telah merekomendasikan sebelumnya, bahwa BP akan memberikan manfaat nyata jangka pendek di bidang kesehatan, termasuk air bersih, dan pendidikan. Saat ini, tampaknya terdapat kemajuan yang teramat sangat dalam bidang kesehatan daripada pendidikan.

Di bidang perawatan kesehatan, Panel terkesan dengan komitmen BP, dan kemajuan masing-masing program berjalan. Di samping klinik kesehatan, dan program kebidanan di DAV, BP telah membuat kemajuan berarti, dalam program pengendalian malaria dan dalam kegiatan kesehatan ibu dan anak. Juga, dalam kemitraan dengan USAID, UNDP, Departemen Kesehatan dan LSM, BP aktif mempromosikan kesadaran akan HIV-nya, dan program pencegahan, baik secara lokal maupun di seluruh daerah Kepala Burung. Dengan mengingat besarnya arus pekerja migran yang diharapkan selama pembangunan tersebut, dan prevalensi HIV di wilayah lain Papua, adalah penting, bahwa BP bekerjasama dengan pejabat berwenang kesehatan setempat dalam pencegahan HIV di seluruh wilayah Kepala Burung.

Hanya baru ada manfaat kecil terhadap pendidikan yang tampak, meskipun di setiap tingkat daerah pemerintahan di Papua, pendidikan digaribawahi sebagai prioritas. Di samping itu, pendirian Sekolah Menengah Pertama di Tanah Merah, sekolah magnet yang sebelumnya disarankan, BP harus bekerjasama dengan pejabat Kabupaten Bintuni, untuk mendukung peningkatan di setiap DAV dan kota-kota yang terkena dampak Proyek di wilayah tersebut. Hal ini terutama penting di masyarakat pantai utara. Dukungan bagi pendidikan dasar di DAV harus terlepas dan diberikan di samping dana bantuan pengembangan masyarakat tahunan.

Meskipun program manfaat BP di bidang kesehatan dan pengembangan masyarakat, terdapat suatu ketidaksetaraan yang mencolok dalam perumahan, di antara perlakuan penduduk Tanah Merah yang direlokasi dan penduduk desa lain yang terkena dampak. Panel sebelumnya

mencatat bahwa langkah-langkah tambahan harus diambil untuk memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat pantai utara “ karena” kebanyakan pembangunan dan manfaat yang diberikan oleh provider perumahan, kesehatan dan prasarana akan mengalir kepada masyarakat di pantai selatan”¹⁶

Panel merekomendasikan untuk mengadakan suatu dana pengembangan yang terpisah untuk masyarakat pantai utara. Usulan yang serupa juga diajukan oleh para pejabat Bintuni, yang mengusulkan suatu program investasi untuk pantai utara dan Gubernur Papua, yang menyarankan pembangunan prasarana dan perumahan untuk menghilangkan persepsi ketidaksetaraan.

Panel sangat merekomendasikan bahwa BP mengadakan dana semacam ini atau program dengan berkoordinasi dengan Kabupaten Bintuni, yang merupakan baik pantai utara maupun selatan. Karena perbedaan yang mencolok dalam perumahan tradisional, dan rumah-rumah baru di Tanah Merah, Onar dan Saengga, Panel secara khusus merekomendasikan agar BP menjajaki dengan pejabat propinsi dan setempat, kemungkinan untuk mendukung program bantuan perumahan. Program renovasi dan pembanguann rumah jangka panjang dapat memberikan baik manfaat stabndar kehidupan di setiap DAV maupun hubungan kerja substansuiial jangka panjang kepada orang Papua setempat, yang telah dilatih dalam ketrampilan pembangunan, pertukangan kayu, pekerjaan pipa dan listrik.

Sudah barang tentu dana pembangunan untuk pantai utara, dapat menangani prasarana lain atau peningkatan masyarakat seperti air bersih dan sanitasi, namun program perumahan akan merupakan area yang

¹⁶ Laporan TIAP Kedua di hal. 18.

memungkinkan yang memadukan manfaat segera dalam standar hidup, pelatihan dan pekerjaan, dan pengembangan ketrampilan kejuruan yang berkelanjutan dan dapat dialihkan.

Rekomendasi:

- Dana bantuan pengembangan masyarakat untuk setiap DAV harus dilanjutkan melalui tahap pembangunan Proyek tersebut.
- Program BP untuk melatih orang-orang Papua dalam posisi operasi dan manajemen di Tangguh harus dilanjutkan dan diperluas.
- Setiap upaya harus dilakukan untuk pengadaan barang-barang dan jasa secara lokal, dimana memungkinkan.
- Sehubungan dengan administrasi dana pengembangan masyarakat DAV, BP harus menjelaskan bahwa para kepala desa harus menyetujui proyek-proyek sebagaimana mestinya untuk didanai, sehingga semua dana akan tetap ada bagi para penduduk desa, jika tidak dibelanjakan pada tahun berjalan; dan suatu pembukuan lengkap dari semua dana yang dikucurkan harus disediakan untuk dapat dilihat setiap penduduk desa tersebut.
- Di samping program kesehatannya didalam DAVs maupun kegiatan pengendalian malaria, adalah penting bahwa BP bekerja dengan pejabat berwenang kesehatan untuk mengatasi pencegahan HIV di seluruh daerah Kepala Burung.
- Disamping pembangunan masyarakat tahunan di DAV, BP harus bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni untuk mendukung peningkatan di sekolah-sekolah dasar di setiap DAV, dan kota-kota yang terkena dampak di wilayah tersebut.
- Dengan berkoordinasi dengan Kabupaten Bintuni, BP harus mengadakan dana atau program, untuk mendukung pembangunan di masyarakat pantai utara, termasuk kemungkinann untuk program jangka panjang dalam renovasi rumah dan pembangunan, di setiap DAV,

VI. Keamanan dan Hak Azasi Manusia

Keamanan tetap merupakan masalah peka dan kepedulian. Akan tetap terdapat kemungkinan operasi pasukan Tentara Nasional Indonesia yang

berkelanjutan, yang telah dicurigai menggunakan proporsi kekuatan dalam penyalahgunaan hak-hak orang sipil. Akan tetapi, di masa lalu, terdapat kemajuan yang signifikan dalam menerapkan konsep BP untuk keamanan terpadu berbasis masyarakat. Panel telah mendukung program ini sebagai sarana untuk memperkecil hingga sekecil-kecilnya ancaman pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan Tangguh.

Jelas, pada bulan April 2004, Kepala Polisi Daerah Papua, dan BP, telah mengadakan surat keputusan bersama, berkenaan dengan pedoman lapangan untuk implementasi tindakan bersama dalam wilayah kontrak proyek LNG Tangguh ("Pedoman Lapangan untuk Keamanan"). Pedoman Lapangan untuk Keamanan yang dibuat menggantikan asas keamanan, yang baik keamanan BP maupun polisi Papua, yang mempunyai komitmen kuat untuk memegang asas dasar Hak Asasi Manusia, untuk menetapkan sebagai prioritas pencegahan cedera dan fatalitas melalui penggunaan kekuatan; dan untuk melakukan pendekatan pada semua masalah dengan rasa saling menghormati dan komitmen untuk memecahkan semua masalah, tanpa melalui kekerasan dan intimidasi. Pedoman lapangan untuk keamanan ini secara khusus menginkorporasikan standar asas kesukarelaan pada keamanan, dan hak asasi manusia dan Asas Dasar PBB mengenai penggunaan pasukan dan perlakuan terhadap penyerang.

Pedoman Lapangan untuk Keamanan menentukan semua standar keamanan dan prosedur dan memisahkan tanggungjawab Petugas Keamanan BP dan Polisi Papua. Pedoman lapangan untuk keamanan memikirkan suatu kisaran rentang perspektif dari pencurian kecil-kecilan sampai demonstrasi sampai situasi penyanderaan. Dalam semua keadaan, Polisi akan dipanggil turut serta hanya atas permintaan BP, bantuan TNI hanya akan diminta sebagai pemecahan terakhir berdasarkan permintaan keamanan terkoordinasi Keamanan BP dan Polisi Papua. Dengan tindakan ini, pedoman lapangan untuk keamanan akan menerapkan prosedur untuk mengimplementasikan konsep keamanan berbasis masyarakat.

Disamping mensyaratkan pemenuhan asas sukarela, semua personil Polisi harus dilatih sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan Internasional dan pedoman berikut ini: menggunakan kekuatan minimum jika perlu hanya untuk mengendalikan situasi kekerasan apapun; menghindari fatalitas dan pencemaran lingkungan; pengawasan penggunaan senjata untuk meredam risiko ancaman bahaya bagi orang-orang, yang tidak terlibat; dengan menggunakan persuasi sebagai prioritas pertama; mengambil tindakan yang bisa menyebabkan cedera atau kematian, hanya sebagai pemecahan terakhir; dan segera melaporkan insiden senjata atau tindakan apapun yang menyebabkan kematian, atau cedera.

Pedoman lapangan untuk keamanan juga secara khusus mensyaratkan masing-masing entitas untuk menanggung biaya kegiatannya sendiri dalam melakukan kewajibannya. Dan ditentukan, bahwa semua biaya, pembayaran dan pemberian material atau pasokan akan bersifat terbuka dan transparan, dengan masing-masing pihak mengizinkan untuk mengungkapkan informasi secara umum. Apabila BP meminta bantuan keamanan, dari Polisi Papua, maka ia dapat meminta biaya pembayaran yang dapat diganti dari BPMIGAS untuk transportasi, penginapan, makanan dan keperluan sehari-hari. Dalam keadaan apapun, BP tidak akan memberikan atau membayar senjata, persenjataan, amunisi atau pendanaan apapun yang mendukung pengadaan barang-barang ini.

Pedoman lapangan untuk keamanan merupakan suatu langkah maju kedepan, Panel telah membahasnya dengan Kepala Polisi setempat di Babo, dan Kepala Polisi Daerah di Jayapura. Keduanya memahami pentingnya dan mempunyai komitmen untuk memenuhi persyaratannya. Panel merekomendasikan agar BP meminta pedoman lapangan untuk keamanan disiarkan kepada umum, dan agar sesuai dengan ini BP berjanji secara terbuka untuk mengungkapkan semua pembayaran atau pengadaan yang dibuat sesuai dengan ini.

Panel juga membahas pedoman lapangan untuk keamanan dengan Komandan Militer setempat sementara menunjukkan, bahwa Tangguh merupakan proyek nasional yang vital. Ia menguraikan asas keamanan terpadu berbasis masyarakat sebagai mekanisme baru untuk keamanan di proyek-proyek seperti Tangguh. Ia menjelaskan, bahwa tidak akan ada kekuatan TNI di tempat atau dekat Tagguh, dan bahwa keterlibatan TNI hanya dapat terjadi sebagai pemecahan terakhir, apabila Keamanan Internal BP dan polisi Papua meminta bantuan. Dengan sudut pandang ini, tidak akan terdapat masalah keamanan di wilayah Teluk Bintuni, pada saat ini, namun ia mengharapkan kepedulian mengenai kemungkinan adanya provokasi di masa nanti, kepada penduduk setempat, dari adanya perpindahan tenaga kerja selama jangkawaktu pembangunan dan produksi.

Pendirian irian Jaya Barat akan mempunyai konsekuensi terhadap keamanan Tangguh yang kebanyakan cukup berarti, pembentukan propinsi baru mungkin akan menyebabkan adanya komando Polisi di Manokwari. Akan tetapi, karena pedoman lapangan keamanan diimplementasikan sesuai dengan Memorandum Kesepahaman tertanggal 20 Mei 2003, yang diadakan di antara BPMigas dan Polisi Indonesia, Panel tidak mengantisipasi perubahan apapun apabila tanggungjawab untuk implementasi diserahkan dari Kepala polisi di Jayapura kepada komando polisi daerah Irian Jaya Barat. Akan tetapi, apabila terjadi pengalihan semacam ini, BP harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin, bahwa komando polisi baru menerapkan Pedoman Lapangan

30

yang telah disepakati sebelumnya dan mempunyai komitmen kepada semua asas ini.

Tidak terdapat kebijakan saat ini untuk memekarkan komando daerah militer TNI untuk Papua dengan berdirinya propinsi baru ini. Jadi, untuk saat ini, Tangguh mungkin akan tetap ada di bawah yurisdiksi komando daerah Papua. Akan tetapi, subkomando mungkin akan diadakan di daerah Kecamatan Bintuni tersebut.

Rekomendasi:

- Surat keputusan bersama di antara BP dan Polisi Daerah Papua, mengenai pedoman pelaksanaan Langkah Keamanan Bersama harus diadakan bagi umum dan sesuai dengan pedoman tersebut, BP harus mempunyai komitmen untuk secara terbuka mengungkapkan semua pembayaran atau pengadaan material atau jasa yang dibuat dibawah ini.
- BP harus menjamin, bahwa Pedoman lapangan untuk tindakan Keamanan di antara BP dan Polisi daerah Papua, diterapkan oleh Komando Polisi Baru, yang dibentuk di propinsi Irian Jaya Barat.
- Apabila suatu komando baru ditegakkan oleh TNI, di Kecamatan Bintuni, maka BP harus mengadakan hubungan baik dengan subkomandan dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa ia mempunyai komitmen pada Pedoman Lapangan untuk keamanan dan asas keamanan berbasis masyarakat tersebut.

VII. Membawa Kemajuan Dan Kelancaran Aliran Pendapatan Kepada Daerah

Pada setiap laporannya terdahulu, Panel menunjukkan bahwa akan memerlukan waktu satu dekade atau lebih dari dimulainya pembangunan sebelum pendapatan pemerintah yang signifikan mengalir dari Tangguh ke Papua, sesuai dengan otonomi daerah. Panel merekomendasikan agar BP menjajaki bersama Perusahaan multinasional, dan Pemerintah Indonesia dan Papua, baik apakah dana eksternal dapat diadakan untuk memajukan dan memperlancar profil pendapatan projek tersebut. Kebutuhan untuk mekanisme finansial semacam ini, kini akan lebih akut akibat pemekaran Papua yang diusulkan. terlaksana

Masih ada ketidakpastian yang signifikan mengenai hukum berkenaan dengan ketentuan permohonan pendapatan dari ketentuan hukum perundang-undangan otonomi, kepada propinsi Irian Jaya Barat yang

diusulkan. Propinsi ini akan memberikan 70% keuntungan setelah pajak pemerintah dari Tangguh kepada propinsi tersebut.

Panel yakin, bahwa adalah maksud dari Pemerintah Indonesia untuk menerapkan ketentuan pemekaran ini di Irian Jaya Barat, sebagaimana tengah diterapkan di Papua. Pada saat maksud ini terlaksana, maka pendapatan yang diperoleh dari operasi Freeport akan mengalir terpisah ke bagian Propinsi Papua selebihnya; dan Irian Jaya Barat akan pada awalnya, dibiarkan dengan pendapatan, yang minimum, dari proyek-proyek tambang maupun energi.

Pada akhirnya, semua pendapatan Propinsi yang diperoleh dari Tangguh akan mengalir ke Irian Jaya Barat, dan Propinsi baru ini akan mengalami suatu asupan dana yang melebihi, tidak saja anggaran Propinsi tersebut saat ini, namun juga anggaran tahunan total Propinsi, yang sebelumnya dimekarkan dari Papua ini. Akibat alokasi ini, terkecuali langkah-langkah yang menetralsisir diambil, tidak akan ada pendapatan yang mengalir ke Irian Jaya Barat dari ekonomi khusus untuk dekade pertama di Tangguh, dan kemudian, akan ada peningkatan yang tiba-tiba dan bersifat masif. Panel sebelumnya telah mendukung dukungan BP terhadap Aliansi Pengembangan Global untuk meningkatkan Pemerintahan Sipil di wilayah tersebut.¹⁸ Sejauh ini, program tersebut telah berhasil. Namun, program ini harus berlanjut dan memerlukan waktu. Apabila kapasitas Propinsi baru ini adalah untuk membangun secara mantap, dan apabila Propinsi ini adalah untuk berkembang dan sejahtera sebagai akibat dari adanya Tangguh, maka penting bahwa profil pendapatan ini dihindarkan.

Panel melakukan pembahasan yang produktif dengan para pejabat Pemerintah Indonesia, maupun pejabat Bank Dunia, berkenaan dengan mekanisme penghindaran profil pendapatan yang tidak seimbang ini. Terdapat suatu kepentingan khusus, yang dikemukakan oleh Menteri Perencanaan Nasional (Bapennas - Badan Perencanaan Nasional), yang misinya adalah pembangunan jangka panjang dan menunjukkan, bahwa hal ini akan merupakan suatu uji kasus yang baik bagi Indonesia. Lebih lagi, nampaknya memungkinkan bahwa para pemberi pinjaman multinasional, seperti Bank Dunia, mempunyai wewenang pengalaman dan inklinasi untuk melaksanakan suatu mekanisme yang melancarkan pendapatan. Sudah barang tentu, BP tidak dapat dengan sendirinya mendirikan atau berperan serta dalam fasilitas keuangan semacam ini. Ia harus mengawalinya dan melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Propinsi. Akan tetapi, Panel merekomendasikan, bahwa BP memainkan suatu peran yang penting dalam memfasilitasi dan dalam

menjelaskan dampak keuangan dari ketidakseimbangan tersebut kepada para pejabat Departemen kunci dan mendorong fokus mereka pada mekanisme untuk memecahkan masalah ini. Hal ini terutama perlu, bagi Pemerintah Pusat dalam menghadapi tantangan jangka panjang pembangunan kembali Aceh yang bersifat masif.

Rekomendasi:

- Adalah penting, bahwa BP memainkan peranan katalisator (penghubung) dengan Departemen-departemen kunci, Pemerintah Propinsi dan para pemberi pinjaman multinasional guna mendukung pengembangan mekanisme pendanaan yang memajukan dan memperlancar aliran pendapatan Pemerintah Propinsi maupun Kecamatan.

VIII. Mitigasi dampak yang merugikan

Dengan semakin dekatnya waktu pembangunan tersebut, mitigasi dampak-dampak yang merugikan terhadap para penduduk setempat harus menjadi prioritas utama. Panel telah memberikan komentar sebelumnya mulai pentingnya pelaksanaan rekayasa, pengadaan dan pembangunan oleh Kontraktor BP dan Subkontraktornya dalam melaksanakan kebijakan BP dan dalam menjaga standar keamanan, hubungan masyarakat, perlindungan lingkungan dan pemberian lapangan kerja bagi penduduk

setempat. Panel telah memastikan dukungannya untuk rencana-rencana BP bagi Kontraktor dalam mempekerjakan dan membayar para pekerja non residen di lokasi-lokasi terpencil, untuk membatasi kegiatan diluar tapak/lokasi dari para pekerja ini, dan sejauh memungkinkan, untuk memperkecil hingga sekecil-kecilnya, penggunaan uang tunai di atau disekitar tapak/lokasi proyek .

Akan tetapi, mungkin masalah akan timbul. BP dan para Kontraktornya harus mempersiapkan transgresi beberapa pekerjaanya, dan untuk menghadapi keluhan perlakuan tidak adil atau penyalahgunaan. Panel sebelumnya menyarankan bahwa BP memantau semua Kontraktor dan Subkontraktor secara efektif. Panel memastikan juga merekomendasikan bahwa suatu mekanisme yang lebih resmi ditetapkan untuk pemantauan, pelaporan dan penyidikan pelanggaran kebijakan BP berkenaan dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan atau hubungan masyarakat. Mekanisme ini akan memberikan suatu kesempatan, bagi siapapun yang

terkait dengan proyek – termasuk para karyawan BP, Kontraktor atau Subkontraktornya untuk melaporkan secara rahasia kecurigaan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan individu-individu independen yang terlatih, akses kepada manajemen senior di Tangguh. Mekanisme ini akan bertindak tidak saja sebagai alat pemantau maupun laporan yang efektif, namun juga sebagai suatu alat pencegah pelanggaran akan Ketentuan Etika BP dan sebagai mekanisme dalam mengumpulkan fakta untuk tindakan disipliner yang efektif. Manajemen Tangguh akan tetap bertanggungjawab atas semua keputusan yang diambil berkenaan dengan kejadian semacam ini.

Suatu masalah lainnya yang dapat timbul karena pembangunan adalah gangguan pelayaran dan perikanan di Teluk Bintuni. Panel sebelumnya telah merekomendasikan, agar BP melakukan pelestarian dan peningkatan mata pencarian dengan menangkap ikan penduduk desa setempat.¹⁹ Berdasarkan laporan pendahuluan oleh para peneliti di Universitas Papua di Manokwari (“UNIPA”), Panel mempunyai rasa kepedulian yang tidak saja pada masalah operasi penangkapan ikan, yang akan terganggu, namun juga persediaan udang di Teluk Bintuni dapat menurun secara drastis, sebagai akibat dari penangkapan ikan berlebihan oleh trawler-trawler besar non-Papua; dan akibat dari adanya peristiwa erosi maupun sedimentasi yang diakibatkan hak konsesi hutan.²⁰ BP tidak dapat mempengaruhi kecenderungan ini secara langsung. Akan tetapi, BP harus terus bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni ataupun pejabat Departemen Perikanan (sebelumnya dengan kantor Gubernur Papua) untuk mendokumentasikan kegiatan perikanan di Teluk Bintuni, dan mengembangkan rencana manajemen perikanan yang akan mencegah adanya penangkapan ikan dengan trawler-trawler besar. Dan pertemuan dengan Panel, Menteri menyarankan untuk segera menilai situasi di Teluk Bintuni dan menyarankan beberapa metode untuk meningkatkan tangkapan ikan oleh nelayan setempat maupun potensi pendapatan mereka. BP harus bekerjasama dengan Departemen Perikanan dan Kabupaten Bintuni, untuk mendorong dukungan Pemerintah kepada para nelayan setempat dalam bentuk kapal-kapal penangkap ikan yang lebih maju dan perlengkapannya maupun fasilitas penyimpanan wilayah yang akan meningkatkan pendapatan penduduk desa setempat.

Rekomendasi:

- Panel memastikan dukungannya atas rencana-rencana BP bagi Kontraktor untuk memperkerjakan dan membayar para pekerja yang non-residen di wilayah-wilayah terpencil, untuk membatasi kegiatan diluar tapak/lokasi

19. Lihat Laporan TIAP kedua pada hal. 24.

oleh para pekerja ini, dan sejauh memungkinkan, untuk memperkecil penggunaan tunai di atau di sekitar tapak/lokasi proyek.

- Kewajiban kontraktual untuk hubungan kerja dan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh para Kontraktor dan Subkontraktor BP, harus secara seksama dipantau dan secara ketat dilaksanakan.
- Suatu mekanisme harus ditetapkan untuk pemantauan dan pelaporan adanya pelanggaran kebijakan BP oleh karyawan manapun, baik karyawan BP atau para Kontraktornya, berkenaan dengan hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, lingkungan atau pun hubungan masyarakat.
- Berkerja dengan Kabupaten Bintuni dan Departemen Perikanan, BP harus mendukung pengembangan dari rencana pengelolaan perikanan untuk Teluk Bintuni maupun manfaat nyata secara khusus bagi para nelayan setempat dalam bentuk kapal penangkap ikan dan perlengkapannya, yang lebih maju.

IX. Transparansi

Transparansi merupakan suatu masalah penting, di setiap tingkat kegiatan proyek, terutama karena dana substansial yang akan dialihkan diantara Pemerintah. Perlunya untuk pengungkapan dan pertanggungjawaban yang timbul di tingkat nasional berkenaan dengan distribusi pendapatan dari Pemerintah Indonesia ke Propinsi-propinsi dan Kecamatan di wilayah tersebut; pada tingkat Propinsi berkenaan dengan perjanjian yang BP dapat adakan dengan para pejabat di seluruh Propinsi seperti polisi atau TNI; dan pada tingkat setempat berkenaan dengan administrasi dana pengembangan masyarakat untuk DAV, di tingkat desa. Tanpa transparansi tersebut tidak akan terdapat suatu rasa saling percaya dan pemahaman.

BP merupakan pemimpin dalam transparansi keuangan untuk perusahaan mineral maupun penempatan pedoman Inisiatif Ekstraktif Transparansi Industri / ("EITI"). Akan tetapi, BP hanyalah operator Tangguh dan tidak mempunyai kekuasaan atas batasan-batasan atas pengungkapan sepenuhnya yang dapat dikenakan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia. Bagaimanapun, BP harus mendorong transparansi, dimana memungkinkan dan harus dengan sendirinya mengimplementasikan penangkapan tersebut dimana memungkinkan.

Dalam wacana yang mendesak, BP harus mendorong BPMigas untuk menyiarkan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian bagi hasil (PSC) dan unsur-unsur non-komersial atau rangkuman Rencana Pengembangan (POD). Hal ini akan menetapkan suatu preseden sebagaimana mestinya untuk menyiarkan informasi keuangan/fiscal, begitu produksi dimulai dan

pendapatan mulai mengalir. Di tingkat Propinsi, BP harus mempublikasikan Pedoman Lapangan untuk Keamanan dengan Polisi Daerah maupun mengungkapkan semua pembayaran atau pengadaan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pedoman Lapangan untuk Keamanan, terkecuali Kepala Polisi menyatakan suatu keberatan secara hukum. Dan pada tingkat setempat, BP harus mempublikasikan untuk setiap DAV suatu pertanggung jawaban sepenuhnya yang lengkap dari dana pengembangan, yang telah dialokasikan dan dibelanjakan bersama-sama dengan dana yang masih ada.

Disamping itu sebagaimana Panel telah sebelumnya merekomendasikan, BP harus bekerja sama dengan pejabat-pejabat, baik di tingkat nasional, propinsi maupun setempat untuk mendorong adanya transparansi sehubungan dengan semua penerimaan dan pengucuran dana, yang terkait dengan pendapatan yang diterima dari Tangguh.

Rekomendasi:

- Dengan bekerjasama dengan pejabat berwenang ditingkat nasional, propinsi dan setempat, BP harus mendorong adanya publikasi yang jelas mengenai semua penerimaan dan pengucuran dana terkait dengan pendapatan yang diterima dari Tangguh. Segera setelah itu, BP harus mendorong BPMigas untuk menyiarkan ketentuan dan syarat-syarat mengenai perjanjian bagi hasil, dan unsur-unsur non-komersial, atau rangkuman dari rencana pengembangan; publikasi Pedoman Lapangan untuk Keamanan dengan Polisi Daerah dan mengungkapkan pembayaran apapun yang telah dibuat sejauh ini sesuai dengan perjanjian tersebut; dan mempublikasikan untuk setiap DAV suatu pembukuan yang lengkap dari pembelanjaan dana untuk pengembangan masyarakat tersebut.

X. Lingkungan:

Panel sekali lagi akan mengadakan pertemuan dengan para LSM lingkungan, yang menekankan pentingnya ekologi Papua dan kerjasama BP, sejauh ini, dengan Aliansi Pembangunan Global dan dukungannya atas publikasi atlas lingkungan bagi daerah tersebut.¹⁷ Proyek-proyek tersebut kini telah selesai, dan dampak lingkungan langsung yang diakibatkan oleh proyek

21 Atlas/peta lingkungan adalah sumber yang sangat berharga dalam perlindungan lingkungan di teluk tersebut dan sumberdaya bumi/alamnya. Panel memahami bahwa salinan-salinan tambahan akan diperlukan. BP harus mendukung pencetakan ulang atlas tersebut sehingga tersedia salinan-salinan ketika diperlukan.

pembangunan dan produksi tersebut harus segera ditangani. Keterlibatan yang lebih daripada komitmen BP, yang bersifat unilateral pada kewajiban lingkungan, diketengahkan dalam AMDAL. Hal ini juga harus mencakup suatu upaya yang ditekankan dalam bekerjasama dengan para pejabat berwenang lingkungan, baik di tingkat setempat, propinsi dan nasional untuk menjaga ekosistem Teluk Bintuni dan wilayah sekelilingnya, yang dekat dengan tapak Proyek/lokasi Proyek.

Adalah sangat penting bahwa BP memantau dan mengawasi semua limbah dan buangan lainnya, baik di darat maupun di lepas pantai, selama pembangunan; dan bahwa hasil pemantauan tersebut diinformasikan kepada semua pihak berwenang sebagaimana mestinya. Pentingnya praktek ini dapat digarisbawahi, dengan kenyataan: kesulitan yang dihadapi saat ini oleh PT. Newmont Mining berkenaan dengan tuduhan pembuangan ilegal dan tanpa ijin yang memadai. Apapun hasil dari kasus Newmont menggambarkan perlunya untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat lingkungan secara tetap dan konsisten dan untuk berkonsultasi secara berkala dengan pihak yang berwenang.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Teluk Bintuni mencakup hutan bakau-bakau/mangrova yang paling luas di Asia Tenggara, yang terletak delapanpuluh (80) kilometer di Timur kawasan Proyek didalam wilayah Cagar Alam. Panel telah sebelumnya merekomendasikan, bahwa kekuatan BP adalah dukungannya untuk kelestarian hutan bakau-bakau/mangrova tersebut. Panel menyatakan kembali dukungannya untuk upaya tersebut. Kelestarian cagar alam tidak hanya akan berfungsi penting dalam sasaran lingkungan global, namun juga dalam memberikan suatu penyelesaian ekologis, yang diakui, yang akan selamanya terkait dengan proyek Tangguh. Panel merekomendasikan, bahwa BP melanjutkan hubungannya dengan Proyek ini. Dukungannya kepada proyek ini, akan dalam bentuk pengelolaan Cagar Alam.

Rekomendasi

- Disamping komitmennya yang telah ditetapkan didalam AMDAL, BP harus berkonsultasi dengan pihak berwenang, baik di tingkat setempat, propinsi maupun nasional untuk mengamankan ekosistem Teluk Bintuni dan wilayah sekelilingnya, yang berdekatan dengan Tapak/Lokasi Proyek tersebut.
- BP harus memantau semua limbah dan buangan lainnya, baik di pantai maupun di lepas pantai selama pembangunan proyek tersebut dan

menginformasikan hasilnya kepada semua pihak berwenang yang terkait.

- BP harus memastikan dan melanjutkan komitmennya untuk mendukung kelestarian hutan bakau-bakau/mangrova, yang penting/kritis, termasuk Pendirian Cagar Alam di Teluk Bintuni.

XI. Informasi Umum

Disamping upaya BP dalam meningkatkan penyebaran informasi, jelas bahwa BP belum mengkomunikasikan secara efektif sebagaimana seharusnya kepada para stakeholder di Papua dan terutama dengan beberapa konstituen yang paling penting di Teluk Bintuni. Panel mengakui kesulitan BP dalam menyebarkan informasi di wilayah teluk ini, namun menggarisbawahi perlunya BP untuk mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat, yang paling terkena dampak Proyek tersebut.

Panel menyadari mengenai beberapa artikel yang telah dipublikasikan mengenai Tanah Merah ini dan meningkatkan secara material standar kehidupan penduduknya. Nampaknya, Panel belum secara virtual mempublikasikan di luar negeri berkenaan dengan manfaat di masa nanti, dibidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Teluk Bintuni. Adalah penting, agar komunikasi semacam ini ditingkatkan ketika pembangunan dimulai.

Panel sebelumnya merekomendasikan, bahwa sepanjang "memungkinkan" (komunikasi BP) akan melibatkan langsung penduduk di wilayah ini.²² Hal ini tetap menjadi rekomendasi utama Panel di wilayah ini. BP dianggap tidak memadai, apabila hanya mengumumkan bahwa BP akan menjalankan semua komitmennya, di bidang sosial dan lingkungan, sebagaimana diuraikan didalam AMDAL. Masalah ini tidak mempunyai arti yang nyata bagi masyarakat Teluk Bintuni. Informasi yang sederhana, namun spesifik berkenaan dengan tindakan-tindakan nyata, yang diperlukan untuk mencapai penduduk yang dituju. Publikasi tertulis saja, tidak akan memadai. BP harus menyikapinya dengan menjajaki potensi radio atau media lainnya, sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang terkena dampak, maupun sebagai komunikasi pribadi yang berkelanjutan dengan DAVs.

Begitu pembangunan dimulai, juga penting bahwa BP siap berurusan dengan komunikasi yang cermat, dalam hal terjadi suatu kecelakaan apapun atau insiden lainnya yang merugikan. Pengalaman dimanapun menunjukkan, bahwa kecelakaan apapun di Tapak /Proyek seperti Tangguh akan menarik perhatian media masa secara luas, diluar kapasitas staf media setempat. Dengan demikian, penting bahwa BP menetapkan prosedur yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai kecelakaan apapun yang terkait dengan Proyek.

Secara terpisah, BP sebelumnya telah mengusulkan dibentuknya suatu forum Teluk Bintuni, yang tujuannya adalah menyediakan suatu proses partisipatif bagi penduduk setempat untuk membahas pembangunan Teluk Bintuni tersebut. Kurang jelas, apakah forum ini telah dilembagakan atau tidak. Panel merekomendasikan, agar BP bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni membentuk forum ini dan bahwa pembahasan mengenai proyek tersebut dipublikasikan di seluruh kawasan Teluk. Forum tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai suatu cara untuk baik mempublikasikan masalah-masalah yang terkait dengan Tangguh, maupun untuk meningkatkan komunikasi dan kesepahaman diantara masyarakat di seluruh kawasan Teluk tersebut.

Rekomendasi:

- Adalah penting untuk menggunakan metode baru dan inovatif dalam mengkomunikasikan informasi, yang mudah dipahami dan khusus, berkenaan dengan kegiatan dan komitmen Proyek kepada masyarakat Teluk Bintuni.
- BP harus mengupayakan publikasi yang lebih luas dengan memasang artikel-artikel di media luar negeri berkenaan dengan proyek yang ada maupun yang akan dibangun dibidang pengembangan, kesehatan, pendidikan, perekonomian di wilayah Teluk Bintuni.
- BP harus menetapkan prosedur untuk media dan komunikasi berkenaan dengan adanya kecelakaan atau insiden apapun yang merugikan yang terkait dengan Proyek tersebut.
- Dengan bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni, BP harus membentuk forum Teluk Bintuni sebagai mekanisme kegiatan publikasi dan masalah-masalah yang terkait dengan Proyek Tangguh dan meningkatkan komunikasi di antara masyarakat di seluruh wilayah Teluk Bintuni.

